

KINERJA KEUANGAN DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018-2021

Aulia Nuril Fadhilah¹, Amin Tohari², Badrus Zaman³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri, Jawa Timur aulianuril65@gmail.com

Informasi artikel:

Tanggal Masuk: 7 Juli 2022 Tanggal Revisi: 10 Agustus 2022 Tanggal diterima: 10 September 2022

Abstract

This study is intended to measure the financial performance of the Kediri City Government in 2018-2021 in terms of the ratio of effectiveness, efficiency, independence, activity and growth. The approach and analysis technique used is descriptive quantitative. Secondary data collection using the method of documentation. The results showed that the financial performance of the City of Kediri in terms of the effectiveness ratio is classified as very effective at 121,98%. The efficiency ratio of 94,74% is considered less efficient. The independence ratio of 29,86% is considered low. The activity ratio consists of operating expenditure of 87,05% and capital expenditure of 10,19%. The growth ratio is positive, but the growth of PAD, revenue and capital expenditure is negative in 2019-2020. There are several studies that examine government financial performance, but researchers argue that different places and years of research included novelty.

Keywords: Financial Perfomance, Effectiveness Ratio, Efficiency, Independece, Activity, Growth

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2021 ditinjau melalui rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas dan pertumbuhan. Pendekatan dan teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Kota Kediri ditinjau dari rasio efektivitas tergolong sangat efektif sebesar 121,98%. Rasio efisiensi sebesar 94,74% dinilai kurang efisien. Rasio kemandirian 29,86% dianggap rendah. Rasio aktivitas terdiri dari belanja operasi senilai 87,05% dan belanja modal senilai 10,19%. Rasio pertumbuhan positif, namun pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja modal bernilai negatif tahun 2019-2020. Ada beberapa penelitian yang mengkaji kinerja keuangan pemerintah, namun peneliti berpendapat bahwa berbeda tempat dan tahun penelitian termasuk kebaruan.

Keywords: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi, Kemandirian, Aktivitas, Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Sektor pemerintahan pada era reformasi mengharuskan memiliki kinerja yang efektif dan efisien. Mengingat tuntutan masyarakat akan kesejahteraan memaksa pemerintah mengubah tatanan lembaga publik Indonesia dalam menjalankan otonomi daerah dengan menciptakan tatanan pemerintahan yang transparan dan berakuntabilitas tinggi serta mengambil kebijakan sesuai tujuan pemerintah yakni melayani masyarakat dengan pelayanan publik. Pelaksanakan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mandiri dalam mengatur keuangannya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Terbatasnya dana Pendapatan Asli Daerah menjadi masalah umum dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Evaluasi kinerja keuangan suatu organisasi dilakukan untuk melihat seberapa baik pengelolaan keuangan yang diterapkan [1]. Kinerja pemerintah dapat diketahui dari seberapa baik penentuan porsi anggaran sesuai kebutuhan serta potensi yang dimiliki. Kemampuan tersebut dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah. Dimana laporan tersebut bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah [2]. Laporan keuangan pemerintah digunakan untuk memantau serta menilai penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan serta kinerja masing-masing unit kerja didalamnya [3].Kinerja keuangan dapat diketahui melalui rasio keuangan daerah. Hasil kajian rasio keuangan menunjukkan baik atau tidaknya kinerja keuangan daerah [4].

Rasio efektivitas menunjukkan kapasitas pemerintah dalam merealisasi penerimaan PAD sesuai yang dianggarkan. Realisasi dan target penerimaan PAD digunakan untuk menghitung rasio tersebut. Jadi suatu



daerah dikatakan efektif jika realisasi pendapatannya melebihi anggaran yang ditetapkan karena semakin besar rasio, maka kinerja keuangan daerah semakin baik [5].

Rasio efisiensi membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Jika nilai rasio rendah maka dikatakan efisien dan begitu sebaliknya [6].

Rasio kemandirian menunjukkan kemandirian daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah serta penyediaan layanan masyarakat yang berkontribusi melalui pajak dan retribusi. Semakin besar nilai rasio maka ketergantungan kepada pemerintah pusat atau pihak eksternal semakin rendah [4].

Rasio aktivitas menunjukkan prioritas pemerintah mengalokasi dana untuk belanja operasi dan belanja modal. Jika alokasi dana pada belanja modal besar maka alokasi dana pada belanja operasi begitu juga sebaliknya [3].

Rasio pertumbuhan menunjukkan kapasitas pemerintah untuk mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari waktu ke waktu [4]. Rasio pertumbuhan digunakan untuk menentukan anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif [3].

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Hasnita (2021) mengenai analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja pemerintah kota Kendari menunjukkan tingkat kemandirian pada pola hubungan instruktif, rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan belum efektif dan efisien dalam merealisasikan PAD, rasio keserasian menunjukkan sebagian besar dana diprioritaskan untuk kenutuhan belanja rutin sehingga belanja pembangunan rendah, dan rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif.

Penelitian lainnya yang dilakukan Fathah (2017) dengan analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerinta daerah kabupaten Gunung Kidul dilihat dari rasio efektifitas PAD tergolong efektf, rasio efisiensi keuangan daerah belum efisien, rasio keserasian masih banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modalnya, rasio pertumbuhan PAD tumbuh secara positif, dan rasio kemandirian daerah rendah sekali.

Dilansir dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Kediri tahun 2018-2021 ketergantungan pemerintah Kota Kediri pada subsidi pemerintah pusat tinggi dimana ini tercermin dari relative rendahnya Pendapatan Asli Daerah daripada pendapatan transfer. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas daerah dalam menjelajahi sumber PAD serta mengelola sumber pendapatan yang ada.

METODE

Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif serta teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Reakisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri tahun 2018-2021. Subjek dalam penelitian ini yakni Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Tahapan penelitian yang pertama adalah mengumpulkan data, menghitung rasio keuangan sesuai data Laporan Realisasi Anggaran, mendeskripsikan data hasil perhitungan rasio keuangan. Penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri menggunakan rumus rasio keuangan daerah yang meliputi:

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai rasio >100% dikatakan sangat efektif, 100% dikatakan efektif, 90%-99% dikatakan cukup efektif, 75%-89% dikatakan kurang efektif, <75% dikatakan tidak efektif [5].

2. Rasio Efisiensi

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai rasio >100% dikatakan tidak efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, 80%-90% dikatakan cukup efisien, 60%-80% dikatakan efisien, >60% dikatakan sangat efisien [9].

3. Rasio Kemandirian



$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Nilai rasio 0%-25% menunjukkan tingkat kemandirian rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif, nilai rasio 25%-50% tingkat kemandirian rendah dan memiliki pola hubungan konstruktif, nilai rasio 50%-75% tingkat kemandirian sedang dan memiliki pola hubungan partisipatif, nilai rasio 75%-100% tingkat kemandirian tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif [6].

- 4. Rasio Aktivitas terdiri atas :
 - a. Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Operasi

Kriteria rasio belanja modal dan belanja operasi belum ada kriteria pasti, namun umumnya proporsi belanja modal antara 5%-20% sedangkan proporsi belanja operasi berkisar antara 60%-90% [3].

- 5. Rasio Pertumbuhan terdiri atas :
 - a. Pertumbuhan PAD

$$= \frac{PAD \ t_n - t_{n-1}}{PAD \ t_{n-1}} \ x \ 100\%$$

b. Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\sum Pendapatan t_n - t_n - 1}{\sum Pendapatan t_n - 1} \times 100\%$$

c. Pertumbuhan Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Belanja Operasi } t_n - t_{n-1}}{\text{Belanja Operasi } t_n - t_n} \times 100\%$$

d. Pertumbuhan Belanja Modal

$$= \frac{\text{Belanja Modal } t_{\rm n} - t_{\rm n} - _{\rm 1}}{\text{Belanja Modal } t_{\rm n} - _{\rm 1}} \ x \ 100\%$$

Pertumbuhan dikatakan positif ketika pemerintah daerah mampu bertahan serta meningkatkan realisasi pendapatan dari periode sebelumnya, begitu pula sebaliknya pertumbuhan dikatakan negatif apabila pemerintah tidak bisa bertahan dan meningkatkan realisasi pendapatan dari periode sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Rasio Efektivitas

Tabel 1
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas



Keterangan	Tahun Anggaran			
	2018	2019	2020	2021
Reaslisasi Penerimaan PAI	249.093.229.531,44	266.745.042.377,64	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18
Target Penerimaan PAD	241.268.069.987,86	249.757.851.397,53	239.764.641.013,51	261.464.732.171,00
Efektivitas PAD (%)	103,24	106,80	109,64	168,24
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Rata-rata (%)	121,98			

Sumber: LRA Kota Kediri tahun 2018-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 diketahui rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2021 menunjukkan angka yang tinggi dan dikategorikan sangat efektif. Rasio efektivitas tahun 2018 yakni 103,24%, tahun 2019 yakni 106,80%, tahun 2020 sebesar 109,64%, tahun 2021 sebesar 168,24%. Rrasio efektivitas tahun 2018-2021 diatas 100% yaitu sebesar 121,98%.

2. Rasio Efisiensi

Tabel 2 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Keterangan	Tahun Anggaran			
	2018	2019	2020	2021
Reaslisasi Belanja Daerah	1.237.018.196.187,92	1.312.178.562.618,00	1.206.926.248.080,16	1.344.272.318.953,32
Realisasi Pendapatan Daeral	1.278.488.601.890,94	1.339.405.675.036,73	1.283.093.769.233,74	1.508.822.569.048,64
Efisiensi (%)	96,76	97,97	94,06	89,09
Kriteria	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Kurang Efisien	Cukup Efisien
Rata-rata (%)	94,47			

Sumber: LRA Kota Kediri tahun 2018-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 2 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2020 dinilai kurang efisien sedangkan tahun 2021 dinilai cukup efisien. Rasio efisiensi tahun 2018 sebesar 96,76%, tahun 2019 sebesar 97,97%, tahun 2020 sebesar 94,64%, tahun 2021 sebesar 89,09%. Rasio efisiensi tahun 2018-2021 dianggap kurang efisien rata-rata dimana angka yang dihasilkan kurang dari 100% yaitu sebesar 94,62%.

3. Rasio Kemandirian

Tabel 3
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Keterangan	Tahun Anggaran			
	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	249.093.229.531,44	266.745.042.377,64	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18
Pendapatan Transfer	996.859.583.937,00	1.042.645.161.163,00	989.006.560.735,00	1.040.498.864.867,00
Kemandirian (%)	24,99	25,58	26,58	42,28
Pola Hubungan	Instruktif	Konstruktif	Konstruktif	Konstruktif
Tingkat Kemandirian	Rendah Sekali	Rendah	Rendah	Rendah
Rata-rata (%)	29,86			

Sumber: LRA Kota Kediri tahun 2018-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018 rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif sedangkan tahun 2019-2021 tingkat kemandirian sedang dan memiliki pola hubungan konstruktif. Tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 24,99%, tahun 2019 sebesar 25,58%, tahun 2020 sebesar 26,58%, dan tahun 2021 sebesar 42,28%. Rata-rata rasio kemandirian tahun 2018-2021 sebesar 29,86% menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah dengan pola hubungan konstruktif.



4. Rasio Aktivitas

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

Keterangan	Tahun Anggaran			
	2018	2019	2020	2021
Belanja Modal	133.226.151.028,27	182.759.961.093,26	98.314.709.094,90	106.605.344.496,68
Total Belanja Daerah	1.237.018.196.187,92	1.312.178.562.618,00	1.206.926.248.080,16	1.344.272.318.953,32
Rasio Belanja Modal (%)	10,77	13,93	8,15	7,93
Rata-rata (%)	10,19			
Belanja Operasional	1.103.760.411.909,65	1.129.362.127.591,74	1.004.241.841.088,26	1.205.523.929.891,64
Total Belanja Daerah	1.237.018.196.187,92	1.312.178.562.618,00	1.206.926.248.080,16	1.344.272.318.953,32
Rasio Belanja Operasional (%)	89,23	86,07	83,21	89,68
Rata-rata (%)	87,05			

Sumber: LRA Kota Kediri tahun 2018-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4 rasio aktivitas Pemerintah Daerah Kota Kediri terdiri dari rasio belanja modal dan rasio belanja operasi. Rasio belanja modal berfluktuatif tahun 2018 sebesar 10,77%, tahun 2019 sebesar 13,93%, tahun 2020 sebesar 8,15%, dan tahun 2021 sebesar 7,93%. Rata-rata rasio belanja modal sebesar 10,20%. Sedangkan rasio belanja operasi tahun 2018 sebesar 89,23%, tahun 2019 sebesar 86,07%, tahun 2020 sebesar 83,21%, dan tahun 2021 sebesar 89,68%. Rata-rata rasio belanja operasi sebesar 87,05%. Rasio aktivitas Pemerintah Daerah Kota Kediri sudah baik dan sesuai dengan proporsi.

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Keterangan	Tahun Anggaran			
	2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Pendapatan Asli Daerah	249.093.229.531,44	266.745.042.377,64	262.886.289.227,78	439.896.279.120,18
Rasio Pertumbuhan PAD (%)	-	7,09	-1,45	67,33
Rata-rata (%)	24,32			
Pendapatan Daerah	1.278.488.601.890,94	1.339.405.675.036,73	1.283.093.769.233,74	1.508.822.569.048,64
Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	=	0,05	-4,20	17,59
Rata-rata (%)	6,05			
Belanja Operasi	1.103.760.411.909,65	1.129.362.127.591,74	1.004.241.841.088,26	1.205.523.929.891,64
Rasio Pertumb. Belanja Operasi (%)	-	0,02	0,11	0,20
Rata-rata (%)	11,15			
Belanja Modal	133.226.151.028,27	182.759.961.093,26	98.314.709.094,90	106.605.344.496,68
Rasio Pertumb. Belanja Modal (%)	-	0,37	-0,46	0,08
Rata-rata (%)	-0,20			

Sumber: LRA Kota Kediri tahun 2018-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel 5 rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Kediri terdiri atas rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi dan belanja modal. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan rata-rata sebesar 24,32%. Tahun 2018-2019 sebesar 7,09%, tahun 2019-2020 sebesar -1,45%, tahun 2020-2021 sebesar 67,33%. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan rata-rata sebesar 6,05%. Tahun 2018-2019 sebesar 4,76%, tahun 2019-2020 sebesar -4,20%, tahun 2020-2021 sebesar 17,59%. Rasio pertumbuhan belanja operasi menunjukkan rata-rata sebesar 11,15%. Tahun 2018-2019 sebesar 2,32%, tahun 2019-2020 sebesar 11,08%, tahun 2020-2021 sebesar 20,04%. Rasio pertumbuhan belanja modal menunjukkan rata-rata sebesar -0,20%. Tahun 2018-2019 sebesar 37,18%, tahun 2019-2020 sebesar -46,21%, tahun 2020-2021 sebesar 8,43%.



PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

Hasil rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Kediri terus terjadi kenaikan mulai tahun 2018 - 2021 dan dinyatakan sangat efektif dalam merealisasikan PAD sesuai target dimana nilai rasio yang dihasilkan >100%. Rata-rata rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Kediri sebesar 121,98% hal ini dikarenakan pendapatan melebihi target dari sektor pajak dan retribusi, sehingga dinyatakan sangat efektif dan mempunyai kinerja baik ketika merealisasi PAD yang dianggarkan. Agar dapat tetap bertahan dalam posisi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kediri perlu mengoptimalkan penerimaan dari potensi sumber daya lokal serta memobilisasi penerimaan PAD sesuai target. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Susanto (2019), bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Mataram dilihat dari rasio efektivitas dikategorikan efektif.

2. Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rata-rata rasio efisiensi pemerintah daerah kota Kediri dibawah 100% yaitu sebesar 94,62% sehingga dinyatakan kurang efisien dalam mengelola anggaran belanja yang dikeluarkan dan berakibat memperbesar pengeluaran belanja daerah. Namun meski pemerintah sudah mampu menggunakan anggaran belanjanya kurang dari target yang ditetapkan tetapi demikian pada kenyataannya tingkat efisiensi yang dicapai pada setiap tahunnya menyatakan kurang efisien dan cukup efisien hal ini bisa terjadi karena meningkatnya tingkat pengeluaran dari belanja modal maupun dari belanja operasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fathah (2017), bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul dilihat dari rasio efisiensi belum efisien..

3. Rasio Kemandirian

Berdasar pada perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2021 cenderung mengalami kenaikan. Meskipun rasio kemandirian tiap tahunnya mengalami kenaikan akan tetapi angka yang dihasilkan masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 29,86% yaitu masih berada pada kisaran 0%-50% dan memiliki pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat masih sangat diperlukan dan dominan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kota Kediri perlu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat serta mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki.

4. Rasio Aktivitas

Berdasar pada perhitungan rasio aktvitas yang terdiri atas rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, rasio belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2020 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 87,05%. Rasio belanja modal Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 10,20%. Menurut uraian dan perhitungan diata sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri diutamakan untuk kepentingan belanja operasi sehingga rasio belanja modal rendah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio yang diperoleh yaitu rata-rata rasio belanja operasi lebih besar daripada rasio belanja modal. Hal ini terjadi sebab belum adanya kriteria pasti terkait belanja modal, sehingga pemerintah lebih fokus memenuhi belanja operasi.

5. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan terdiri atas pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja modal dan operasi. Rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan positif dan negatif dengan rata-rata sebesar 24,32%. Rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2018-2021 terjadi pertumbuhan positif dan negatif dengan rata-rata sebesar 6,05%. Rasio pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2018-2021 terjadi pertumbuhan positif dengan rata-rata 11,15%. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kota Kediri tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan yang positif dan negatif pada tahun 2019-2020. Hal ini berarti kecenderungan kinerja keuangan Kota Kediri yaitu tumbuh akan tetapi ada rasio yang belum stabil karena terjadi penurunan dan negatif yaitu rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi, dan belanja modal tahun 2019-2020.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2018-2021 dilihat melalui rasio efektivitas dinyatakatan baik serta sangat efektif dalam memobilisasi PAD karena cenderung mengalami kenaikan tiap tahun, rasio efisiensi dinilai masih kurang efisien karena rata-rata yang dihasilkan kurang dari 100%, rasio kemandirian dianggap masih rendah dengan pola hubungan konstruktif dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah, rasio aktivitas dinyatakan sudah baik dan sesuai proporsi meskipun masih banyak mengalokasikan pada belanja operasi daripada pada belanja modal, rasio pertumbuhan memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan positif, namun pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja modal terjadi pertumbuhan negatif tahun 2019-2020. Maka dari itu untuk dapat tetap bertahan dalam kondisi tersebut, pemerintah Kota Kediri harus mengoptimalkan PAD dengan menggali sumber daya lokal serta memperhatikan besarnya alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal agar seimbang.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Irham F. Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta; 2017.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. vol. 15. 2010.
- [3] Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIE YKPN; 2010.
- [4] Halim A. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat; 2014.
- [5] Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN; 2015.
- [6] Mahsun M. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta; 2016.
- [7] Hasnita N. Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari. J Indones Sos Sains 2021;2:1320–9. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.395.
- [8] Fathah RN. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank 2017;8:33–48.
- [9] Susanto H. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distrib J Manag Bus 2019;7:81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67.